

## THE ROLE OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON PER CAPITA INCOME CONVERGENCE IN EAST JAVA PROVINCE

Erwin Hardianto<sup>1\*</sup>

Achmad Solihin<sup>2</sup> 

<sup>1,2</sup> Economics Department, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

### ABSTRACT

*This research aims to test and analyze the absolute and conditional convergence of per capita income from 38 districts/cities in East Java with the variables PAD, BOS and BOK during the period 2020 - 2022. According to the Chow, Hausmann test and Lagrange Multiplier, the panel data convergence model estimates using the fixed effect model method. Results show that in the districts/cities and observation period, divergent conditions occurred. Also, conditional variables did not have a significant influence on the growth of per capita income. This condition can occur because capital and technology are distributed unevenly between districts/cities. The implication of this research is to improve the allocation and distribution of the government budget, especially those related to School Operational Assistance (BOS) and Health Operational Assistance (BOK).*

**Keywords:** Convergence, Government Spending, BOS, BOK

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisa konvergensi absolut dan kondisional atas pendapatan per kapita dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan variabel PAD, BOS dan BOK selama periode 2020 - 2022. Sesuai hasil uji Chow, Hausman berikut Lagrange Multiplier, model konvergensi data panel di lakukan estimasi menggunakan metode fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada obyek dan periode penelitian tersebut, terjadi kondisi yang divergen, serta variabel kondisional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Kondisi ini dapat terjadi karena modal dan teknologi memiliki sebaran tidak merata antar kabupaten/kota. Implikasi penelitian ini adalah perbaikan pola alokasi dan distribusi anggaran belanja pemerintah, khususnya yang terkait dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).*

**Kata Kunci:** Konvergensi, Belanja Pemerintah, BOS, BOK

**JEL:** H75; O47

**To cite this document:** Hardianto, E., & Solihin, A. (2024). The Role of Government Expenditure on Per Capita Income Convergence in East Java Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 9(2), 248-256. <https://doi.org/10.20473/jiet.v9i2.59190>

### ARTICLE INFO

Received: June 18<sup>th</sup>, 2024  
Revised: November 25<sup>th</sup>, 2024  
Accepted: November 27<sup>th</sup>, 2024  
Online: December 5<sup>th</sup>, 2024

\*Correspondence:  
Erwin Hardianto

E-mail:  
[erwinhardianto@yahoo.com](mailto:erwinhardianto@yahoo.com)

## Pendahuluan

Keynes dalam [Ridwan & Nawir \(2021\)](#), menyampaikan bahwa instrumen kebijakan fiskal dapat digunakan sebagai pengendali perekonomian, jika terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah berikutan penurunan dalam perpajakan, maka secara tidak langsung perekonomian mengalami injeksi, yang dapat berakibat kepada tambahan lapangan kerja. Sebagaimana diketahui, komponen kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif adalah yang berkaitan dengan penerimaan daerah. Di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai penyumbang terbesar berupa pajak daerah. Penurunan pajak dapat dianggap sebagai stimulus untuk tambahan lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan bertambahnya pendapatan per kapita. Namun, di sisi lain, kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja pemerintahannya melalui penerimaan daerah juga diperlukan. Mengingat penerimaan daerah merupakan sumber belanja suatu daerah.

Sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 145 Ayat 2, bahwa transmisi belanja pemerintah pusat kepada daerah melalui jalur Transfer Ke Daerah (TKD). Pasal 131 UU No 1 Tahun 2022 menyebutkan TKD mempunyai bagian yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang bertujuan untuk mendukung operasional layanan daerah. DAK Non Fisik antara lain terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Alokasi belanja daerah sesuai Pasal 147 ayat 1, diarahkan untuk infrastruktur layanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah.

[Wibowo \(2016\)](#), menambahkan tentang perlunya kebijakan belanja daerah dalam rangka pemerataan ketimpangan dalam kesempatan (*inequality of opportunity*). Salah satu contohnya adalah ketimpangan dalam hal pendidikan dan kesehatan yang dapat menimbulkan kendala masuk pasar kerja. Alisjahbana (2012) dalam [Wibowo \(2016\)](#) menjabarkan bahwa perbaikan realokasi pendapatan memerlukan kebijakan komprehensif dengan tujuan akhir perbaikan kualitas hidup manusia.

Perbaikan kualitas hidup tersebut dapat terjadi melalui adanya konvergensi perekonomian dalam kawasan tersebut. Konvergensi dianggap sebagai kondisi di mana daerah miskin (*low income*) tumbuh mendekati pertumbuhan ekonomi dari daerah kaya (*high income*). Sehingga konvergensi dapat menjadi indikator proses terjadinya keseimbangan perekonomian daerah dalam sebuah kawasan. [Wibisono \(2003\)](#), [Dekiawan \(2014\)](#), [Kurniawati \(2019\)](#), [Barkah \(2020\)](#) serta [Negara & Khoinurrofik \(2021\)](#) menggunakan PDRB per kapita dalam mengukur konvergensi. Menurut [Wibisono \(2003\)](#), konvergensi dapat dikelompokkan menjadi konvergensi absolut dan konvergensi kondisional. Konvergensi absolut merupakan penggambaran bagaimana suatu kawasan mendekati kondisi *steady state*, dengan hanya memperhitungkan variabel pendapatan per kapita pada *initial condition* dan *observed condition*. Sementara itu, untuk konvergensi kondisional turut memperhitungkan variabel selain PDRB per kapita. [Barkah \(2020\)](#) menyertakan variabel fiskal kontraktif (PAD dan Dana Perimbangan) berikutan variabel fiskal ekspansif (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal) sebagai variabel kondisional.

Provinsi Jawa Timur merupakan pusat industri serta keuangan untuk Kawasan Timur Indonesia, dengan kontribusi PDRB provinsi sekitar 15% terhadap PDB Indonesia ([Badan Pusat Statistik, 2024](#)). Pemerintah mempunyai prioritas pembangunan atas Provinsi Jawa Timur, antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selama tahun 2021-2022 (lihat Tabel 1), Angka Harapan Hidup (AHH) dan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur masing-masing mengalami peningkatan hingga menjadi 72 tahun dan 8 tahun di tahun 2022.

Selain itu, PDRB/kapita di tahun 2022 sebesar Rp66.250.000 per orang per tahun atau setara Rp5.520.000 per orang per bulan.

**Tabel 1: AHH, RLS dan PDRB per Kapita Provinsi Jawa Timur**

	Tahun	
	2021	2022
<b>AHH</b>	71,4 tahun	71,8 tahun
<b>Rata-rata lama sekolah</b>	7,9 tahun	8,0 tahun
<b>PDRB per kapita/tahun</b>	Rp 59,9 Juta	Rp 66,3 Juta

Sumber: [Badan Pusat Statistik \(2024\)](#)

Penyaluran belanja daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan program nasional yang ditransmisikan melalui mekanisme Transfer Ke Daerah (TKD). Sumber dananya dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan. PAD sendiri merupakan komponen penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, sehingga dapat merefleksikan kapasitas perekonomian sebuah daerah.

Pada tahun 2020-2022, penyaluran dana BOS di Provinsi Jawa Timur berada di kisaran Rp18 milyar-Rp333 milyar per kabupaten/kota per tahun. Terdapat 4 kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS lebih dari Rp200 Milyar per tahun. Hal tersebut termasuk wajar, mengingat keempat kabupaten/kota tersebut merupakan penyumbang murid SD-SMP terbesar di Jawa Timur. Tabel 2 Menjelaskan bahwa keempat kabupaten/kota tersebut menyumbang porsi murid SD - SMP di Jawa Timur sebanyak 3% - 6%, sementara rata-rata kabupaten/kota lainnya mempunyai kontribusi setara 2,5%.

Penyaluran dana BOS tersebut tidak selalu setara dengan besaran PAD, sebagai contoh PAD Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 sebesar Rp785 milyar dengan dana BOS tahun 2022 sebesar Rp105 milyar ([Kementerian Keuangan, 2024](#)). Sementara itu, Kabupaten Jember dengan PAD Rp648 milyar dapat menyalurkan dana BOS sebesar Rp242 milyar. Hal ini mencerminkan aspek realokasi dan redistribusi penerimaan daerah. Meskipun demikian, PDRB per kapita atas Kabupaten Jember dan Bojonegoro masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2: Jumlah Siswa SD - SMP di Kabupaten/kota Terpilih**

Kabupaten/kota	2022			
	Siswa SD	Siswa SMP	Total	Porsi
Kota Surabaya	650 orang	326 orang	976 orang	4,09%
Kabupaten Malang	1.146 orang	351 orang	1.497 orang	6,27%
Kabupaten Jember	1.040 orang	341 orang	1.381 orang	5,79%
Kabupaten Sidoarjo	583 orang	182 orang	765 orang	3,20%
<b>Sub total</b>	<b>3.419 orang</b>	<b>1.200 orang</b>	<b>4.619 orang</b>	<b>19,35%</b>
<b>Sisa Kabupaten/kota</b>	<b>15.556 orang</b>	<b>3.696 orang</b>	<b>19.252 orang</b>	<b>80,65%</b>
<b>Total</b>	<b>18.975 orang</b>	<b>4.896 orang</b>	<b>23.871 orang</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: [Kemendikbud \(2024\)](#)

Berdasar data dari [Kementerian Keuangan \(2024\)](#), pada sisi penyaluran dana BOK, beberapa kabupaten/kota yang memiliki PDRB/kapita lebih besar daripada PDRB/kapita provinsi ternyata menyalurkan dana BOK pada tahun 2022 sekitar Rp8 milyar - Rp27 milyar

per tahun, kecuali Kota Surabaya menyalurkan dana BOK sebesar Rp40 milyar. Pada seluruh kabupaten di Jawa Timur, realisasi dana BOK berada di kisaran Rp25 milyar - Rp60 milyar per tahun. Beberapa kabupaten yang memiliki BOK di atas Rp40 milyar, adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jember. BOK sendiri merupakan upaya pemerintah pusat untuk menyamakan standar pelayanan minimal atas usaha kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis konvergensi dengan tambahan variabel kondisional, yaitu PAD, BOS dan BOK. Data yang digunakan adalah level kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sebanyak 38 data *cross-section* dengan data *time series* 2020 - 2022. Estimasi model menggunakan referensi dari hasil uji model dalam data panel dalam penelitian.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan variabel BOS dan BOK sebagai variabel belanja pemerintah dan menggunakan variabel PAD sebagai variabel penerimaan pemerintah yang berasal dari daerah itu sendiri atau diperoleh secara mandiri. Penggunaan variabel tersebut mempertimbangkan aspek teknis penyaluran, di mana BOS dan BOK disalurkan ke *unit cost* yang terkait, baik itu sekolah maupun puskesmas. Data BOS sendiri yang diambil hanya menggunakan penyaluran BOS untuk SD dan SMP, mengingat level kabupaten/kota diberi kewenangan untuk SD dan SMP, sementara untuk level SMA dikelola oleh provinsi. Sementara dana BOK disalurkan melalui Puskesmas sebagai implementator dan Walikota/Bupati sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*).

### Tinjauan Pustaka

Wibisono (2003) menyampaikan bahwa konsep perekonomian yang konvergen adalah masyarakat berpenghasilan rendah akan tumbuh lebih cepat dibanding masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga hasilnya pendapatan per kapita antar kelas Penghasilan akan menjadi konvergen. Konvergensi ini disebut sebagai tipe konvergensi I atau konvergensi absolut yang menggambarkan proses sebuah daerah menuju kondisi *steady state* yang sama. Sementara itu, tipe konvergensi lainnya dapat disebut sebagai konvergensi kondisional.

Ray (2014) menjabarkan konsep konvergensi kondisional, yaitu kondisi yang muncul karena daerah-daerah di kawasan tersebut memiliki tingkat konvergensi yang berbeda akibat adanya perbedaan *steady state*. Perbedaan ini muncul disebabkan oleh variabel kondisional yang berbeda pada setiap daerah. Asumsi yang bisa menimbulkan perbedaan ini, adalah tingkat populasi maupun tabungan.

Barro & Sala-i-Martin (1992) menjabarkan hasil penelitian atas kondisi perekonomian di Amerika Serikat, bahwa daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berada di bawah *steady state* cenderung lebih cepat mengikuti pertumbuhan ekonomi dalam suatu kawasan. Asumsi yang digunakan adalah kesetaraan teknologi, tidak ada hambatan distribusi barang dan jasa serta akses yang setara untuk pasar keuangan (kredit/pinjaman). Hal tersebut mendukung pendapat Solow (1956) bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita cenderung berbanding terbalik dengan pendapatan per kapita di awal periode, khususnya jika perekonomian memiliki kesamaan dalam hal preferensi serta teknologi. Sehingga, daerah dengan tingkat perekonomian yang miskin akan tumbuh lebih cepat dibandingkan yang kaya. Selain itu, Sala-i-Martin (1996) juga mengasumsikan terjadinya *decreasing returns to scale* dalam hal modal (*capital*). Liliana dkk. dalam Kurniawati (2019) menambahkan bahwa intervensi pemerintah dalam hal belanja atau realisasi anggaran dapat berimbas positif dalam perekonomian.

$$\hat{y} = f(\hat{k}) \quad (1)$$

$$\hat{y} = f(\hat{k}) = A\hat{k}^\alpha \quad (2)$$

$$\log\left(\frac{y_{i,t}}{y_{i,t-1}}\right) = \alpha_i - (1 - e^{-\beta}) [\log(y_{i,t-1}) - x_i(t-1)] + u_{i,t} \quad (3)$$

Pada model pertumbuhan neoklasik untuk perekonomian tertutup, sebagaimana model (1),  $y$  adalah *output* dan  $k$  adalah modal yang digunakan. Sementara itu, tenaga kerja dianggap sebagai variabel yang eksogen yang dapat memicu peningkatan teknologi. Jika dirinci lagi, pembentukan *output* tidak semata-mata berdasar modal, namun juga ada tingkat teknologi ( $A$ ) dan koefisien modal ( $\alpha$ ) bernilai  $0 < \alpha < 1$  (lihat model (2)). Barro & Sala-i-Martin (1992) menggunakan model (3) untuk model estimator dalam penelitian di Amerika Serikat, di mana  $\alpha_i$  diasumsikan sama untuk setiap *cross section* dan  $\beta$  bervariasi setiap *cross section*. Semakin besar  $\beta$ , maka gap kesenjangan antara periode  $y_{i,t}$  dengan  $y_{i,t-1}$  semakin kecil.

Secara empiris, provinsi di Indonesia terbukti mengalami kondisi konvergensi absolut (Wibisono, 2003; Dekiawan, 2014; Negara & Khoirunurrofik, 2021). Sedangkan untuk variabel kondisional yang terbukti mempunyai koefisien  $\beta$  bernilai negatif dengan pengaruh signifikan, adalah penerimaan pemerintah, pajak, total belanja serta belanja barang (Dekiawan, 2014); tenaga kerja, angka partisipasi pendidikan, penerimaan daerah serta pengeluaran daerah (Negara & Khoirunurrofik, 2021). Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, terdapat variabel kondisional yaitu PAD, dana perimbangan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (Barkah, 2020).

Ridwan & Nawir (2021), memberikan 3 kategori pengeluaran pemerintah, yaitu pembelian barang dan jasa, gaji pegawai, *transfer payment* (transfer ke daerah). Widayati (2012), menyampaikan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada produksi nasional, pendapatan nasional, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, konsumsi serta harga. Sebagaimana pemikiran Rostow & Musgrave dalam Ridwan & Nawir (2021) bahwa pengeluaran pemerintah juga dikorelasikan dengan tahap pembangunan. Pada tahap awal, porsi pemerintah akan menjadi dominan dalam perekonomian, karena dibutuhkan untuk pembangunan sarana, prasarana serta infrastruktur. Pada tahap pertengahan, porsi belanja pemerintah lebih diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, di tahap akhir, porsi investasi swasta akan menjadi dominan dibandingkan pemerintah.

UU No. 1 tahun 2022 berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan belanja daerah. Selama ini belanja daerah banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, dan alokasi untuk pembangunan infrastruktur masih kecil, sehingga tidak dapat menunjang pencapaian ekonomi daerah maupun pertumbuhan daerah. Sumber pendanaan untuk belanja daerah, salah satunya adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mempunyai definisi:

*“Pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*

Alokasi belanja daerah, sebagaimana Pasal 147 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2022, telah diatur sebagaimana berikut:

*“Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa”*

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu wujud pengeluaran pemerintah di sektor atau fungsi pendidikan. BOS sendiri merupakan alokasi dana yang berasal dari APBN dengan penggunaan untuk sekolah di seluruh Indonesia. Dana BOS disalurkan melalui kabupaten/kota, sehingga perihal yang terkait sumber daya manusia (*man*), belanja dan barang/jasa (*material*) menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu Pemerintah Provinsi bertindak sebagai koordinator. Sedangkan, Pemerintah Pusat berperan sebagai pembuat kebijakan berikut norma maupun aturan terkait.

Tahun 2020, mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan oleh Kementerian Keuangan langsung menyalurkan ke pemerintah kabupaten/kota dan diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), sehingga alur administrasi birokrasi menjadi lebih sederhana. Penyaluran dana BOS melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah penerima. Proses penyaluran ini dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN), namun dalam hal ini, kewenangannya dikuasakan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di bawah naungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Sementara itu, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan dana bantuan yang dipergunakan untuk belanja program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Mekanisme penyaluran BOK dapat dijelaskan sebagai berikut, Kepala daerah atau Walikota/Bupati berkoordinasi dengan DPRD sebagai *policy maker*, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai fasilitator, Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, koordinator dan regulator, dan Puskesmas sebagai implementator dan akselerator.

### Data dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model konvergensi dengan data panel, berupa 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020 - 2022. Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{PDRB\_KPT_{i,t}}{PDRB\_KPT_{i,t-1}} = \beta_0 + \beta_1 \ln(PDRB\_KPT_{i,t-1}) + \beta_2 \ln BOS_{i,t} + \beta_3 \ln BOK_{i,t} + \beta_4 \ln PAD_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

Di mana  $PDRB\_KPT_{i,t}$  adalah PDRB per kapita pada periode ke- $t$ ,  $PDRB\_KPT_{i,t-1}$  adalah PDRB per kapita pada periode ke- $t-1$ , variabel kondisional yang disertakan yaitu BOS adalah Bantuan Operasional Sekolah tingkat SD - SMP, BOK adalah Bantuan Operasional Kesehatan, PAD adalah Pendapatan Asli Daerah,  $\beta_0$  adalah konstanta atau intersep,  $\beta_1$  adalah koefisien konvergensi dan  $\beta_{2,3,4}$  adalah koefisien variabel kondisional. Heriqbaldi & Jatmiko (2024), menambahkan bahwa untuk memperoleh model yang valid dan kuat (*robust*), maka diperlukan uji estimator atas model ekonomi. Estimasi model tersebut menggunakan kaidah pemilihan model estimator terbaik menggunakan uji Hausman sebagai identifikasi *fixed effect model* atau *random effect model*, uji Chow sebagai identifikasi *common effect model* atau *fixed effect model* dan uji *Lagrange Multiplier* sebagai identifikasi *common effect model* atau *random effect model*.

Baltagi dalam Gujarati (2012) menyampaikan dalam estimasi data panel, menggunakan data *cross section* lebih dari satu waktu (*over time*), sehingga dapat menghilangkan kendala heterogenitas dalam model. Selain itu, metode memperbaiki gejala autokorelasi adalah dengan melakukan transformasi menjadi logaritma maupun menambah data. Model

penelitian ini menggunakan variabel logaritma natural berikut *large sample*, sehingga gejala autokorelasi dapat dihilangkan. Menggunakan data panel, juga dapat mengurangi kolinearitas antar variabel.

### Pembahasan dan Diskusi

Sebelum melakukan estimasi model, maka dilakukan uji model untuk melihat estimasi model yang tepat digunakan sebagai estimator dalam penelitian ini. Berdasar tabel 3, tentang hasil uji model diperoleh hasil bahwa model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Terlihat dari hasil pengujian, nilai *probability value* dari acuan statistik berada di bawah tingkat signifikansi 1%.

**Tabel 3: Hasil Uji Model**

Tipe Konvergensi	Estimasi Model		
	<i>Common Effect</i> (uji Breusch - Pagan)	<i>Fixed Effect</i> (uji Chow)	<i>Random Effect</i> (uji Hausman)
Konvergensi Absolut	ChiBar : 18,43	F : 39,53	Chi : 38,33
	Prob : 0,00	Prob : 0,00	Prob : 0,00
	<b>Hasil : REM</b>	<b>Hasil : FEM</b>	<b>Hasil : FEM</b>
Konvergensi kondisional	ChiBar : 19,67	F : 21,75	Chi : 31,81
	Prob : 0,00	Prob : 0,00	Prob : 0,00
	<b>Hasil : REM</b>	<b>Hasil : FEM</b>	<b>Hasil : FEM</b>

**Tabel 4: Hasil Estimasi Model Penelitian**

Variabel Y		Koefisien Uji t				Uji Simultan	R <sup>2</sup>
		BOS	BOK	PAD	C		
<i>Growth</i>	PDRB/kapita						
Model Konvergensi Absolut	0,409***	N/A	N/A	N/A	-7,011***	39,53***	0,03
	(0,00)				(0,00)	(0,00)	
	<b>Hasil: Divergen</b>						
Model Konvergensi kondisional	0,283**	-0,030	-0,012	0,019	-4,299*	11,19***	0,04
	(0,05)	(0,59)	(0,18)	(0,26)	(0,10)	(0,00)	
	<b>Hasil: Divergen</b>						

Pada tabel 4. Di atas, diperoleh hasil bahwa variabel konvergensi memiliki tingkat signifikansi yang baik, dengan *p-value* di bawah 5% namun memiliki nilai koefisien yang positif, sehingga hal tersebut dapat diterjemahkan sebagai kondisi yang tidak konvergen atau divergen (Barro et al., 1991: 112). Pada model konvergensi kondisional dengan variabel BOS, BOK dan PAD juga ditemukan kondisi yang divergen, dengan tidak ada signifikansi pada variabel kondisional. Meski demikian, kedua model tersebut membuktikan terjadinya hubungan yang simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, terlihat dari hasil uji F berada pada tingkat kesalahan 1%. Meskipun demikian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) terlihat lemah, karena R<sup>2</sup> *overall* di bawah 5%.

Sebagaimana penelitian Barro & Sala-i-Martin (1992) kondisi divergen ini muncul, jika variabel PDRB\_KPT<sub>it-1</sub> sebagai *initial condition* mempunyai pengaruh yang signifikan dengan *slope* bernilai positif. Kondisi ini merupakan penggambaran dari pola pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur yang cenderung tidak menyatu dalam menuju kondisi *steady state*. Salah satu indikasi penyebabnya adalah penguasaan teknologi dan modal di kabupaten/

kota di Jawa Timur yang belum tersebar secara merata. Kondisi *steady state* dalam konvergensi dapat dikaitkan dengan penguasaan teknologi, sebagai contoh untuk daerah/kawasan yang berada di bawah *steady state* akan bergerak mendekati garis *steady state* atau tingkat teknologi tersebut. Ketika tidak terdapat sebaran teknologi atau modal yang merata, mengakibatkan tidak terjadinya efek konvergensi. Implikasi atas kondisi tersebut, diperlukan pemicu dari kondisional variabel yang bertujuan untuk menggerakkan daerah/kawasan tersebut menuju pertumbuhan yang seragam (Barro & Sala-i-Martin, 1992: 110). Jika terdapat perbedaan tingkat teknologi antar kawasan/daerah, maka dapat muncul mobilitas modal yang membuat terjadinya kondisi divergen, terdapat pembatasan pasar pinjaman (kredit) di suatu daerah, sehingga penduduk tidak dapat mengakses pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya, serta pembatasan akses barang, jasa maupun perpindahan orang dari satu daerah ke daerah yang lain.

Pada penelitian Negara & Khoirunurofik (2021) *slope* PAD memiliki nilai yang positif signifikan, serupa dengan di Provinsi Jawa Timur, di mana *slope* positif meskipun tidak signifikan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh masih terdapat anomali dalam hal penerimaan PAD, di mana penerima PAD terbesar adalah Kota Surabaya sedangkan yang memiliki PDRB/kapita terbesar adalah Kota Kediri. Hal ini mengindikasikan adanya pembayaran pajak yang dipungut oleh pusat atau bukan melalui daerah. Sementara itu penyaluran BOS dan BOK untuk Kota Kediri ternyata masih relatif kecil. Akibatnya efek dari komponen *transfer payment* tersebut belum dapat dirasakan secara merata.

Variabel BOS dan BOK terlihat memiliki *slope* yang negatif, namun tidak signifikan. Kedua variabel ini merupakan bagian dari DAK non fisik yang menjadi kesatuan dengan Transfer Ke Daerah (TKD). *Transfer payment* ini bertujuan untuk tercapainya prioritas nasional, yaitu berupa pendidikan dan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Sebagaimana konsep *endogenous growth theory* bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terwujud melalui peningkatan *value human capital*. *Slope* yang bernilai negatif dan tidak signifikan tersebut dapat mengindikasikan bahwa penyaluran dan BOS dan BOK dapat menurunkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Kondisi ini dapat terjadi, ketika sumber dari dana transfer tersebut berasal dari pajak pusat melalui pemungutan pajak penghasilan, PPN dan sejenisnya yang dianggap membebani perekonomian.

## Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu terjadi kondisi yang divergen di kabupaten/kota di Jawa Timur untuk model absolut maupun konvergensi kondisional. Sebagaimana penelitian Barro & Sala-i-Martin (1992) bahwa penyebab kondisi divergen di Jawa Timur adalah tingkat teknologi serta modal antar daerah yang belum setara, akses yang *rigid* pada pasar pinjaman (*credit market*), serta terdapat indikasi mobilisasi tenaga kerja dari daerah dengan pertumbuhan yang rendah kepada pertumbuhan yang tinggi.

Implikasinya adalah kepada pola alokasi maupun distribusi anggaran yang tepat sasaran. Karena, masih diperlukan perbaikan kualitas penyaluran BOS dan BOK. Mengingat PAD yang paling tinggi di Jawa Timur ada di Surabaya, dan penyaluran BOS maupun BOK juga sudah dilakukan merata. Namun, perbaikan kualitas *output* pendidikan maupun layanan kesehatan belum dapat terlihat. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah menggunakan data secara agregat belum di level rumah tangga. Sehingga simpulan yang diperoleh masih bersifat agregat. Sehingga sebagai arah untuk peneliti selanjutnya, penelitian efek konvergensi atau pemerataan dapat dilakukan pada data level rumah tangga.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tabel Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Barkah, A. R. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Percepatan Konvergensi Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1), 1-12.
- Barro, R. J., Sala-i-Martin, X., Blanchard, O. J., & Hall, R. E. (1991). Convergence Across States and Regions. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1991(1), 107-182. <https://doi.org/10.2307/2534639>
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*, 100(2), 223-251. <https://doi.org/10.1086/261816>
- Ray, D. (2014) *Development Economics*. New Jersey: Princeton University Press
- Dekiawan, H. (2014). Konvergensi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia: Pendekatan Data Panel Dinamis Spasial. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 17(1), 99-128. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i1.52>
- Gujarati, N. D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba
- Heriqbaldi, U. & Jatmiko, S.F. (2024). Shadow Economy: Determinants and Its Impact on Foreign Direct Investment. *Jurnal ilmu ekonomi Terapan*, 9(1), 37-50. <https://doi.org/10.20473/jiet.v9i1.57402>
- Kementerian Keuangan. (2024). *Daftar Alokasi Dana Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). *Laporan Penyaluran*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://bos.kemdikbud.go.id/rekap/penyaluran>
- Kurniawati, S. (2019). Regional Income and its Convergence in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(6), 77-83.
- Nazara, S., & Rahayu, S. K. (2013). *Program Keluarga Harapan (PKH): Indonesian Conditional Cash Transfer Program*. Policy Research Brief, 42(October).
- Negara, B. P., & Khoirunurrofik, K. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Konvergensi Pendapatan Per kapita antar Kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1-18. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.185>
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sala-i-Martin, X. X. (1996). The classical approach to convergence analysis. *Economic Journal*, 106(437), 1019-1036. <https://doi.org/10.2307/2235375>
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Wibisono, Y. (2003). Konvergensi di Indonesia, Beberapa Temuan Awal dan Implikasinya. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 139-153. <https://doi.org/10.21002/jepi.v3i2.622>
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 111-132. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.184>